KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI CHENGDU, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan bilateral RI dan RRT telah terjalin lebih dari 70 tahun setelah dimulai tanggal 13 April 1950. Dalam perjalanan, sempat terjadi pembekuan hubungan di tahun 1967 yang dipulihkan kembali pada tahun 1990. Pada bulan April 2005, bersamaan dengan peringatan 55 tahun hubungan bilateral, kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam bentuk Kemitraan Strategis. Hubungan bilateral terus meningkat seiring dengan penetapan Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 juga Pemerintah RRT telah menawarkan ke Pemerintah RI untuk membuka satu lagi perwakilan tingkat konsulat jenderal. Tawaran ini disampaikan menjelang pembukaan Konsulat Jenderal RRT ketiga di Denpasar, Bali. Dua Konsulat Jenderal RRT lainnya berada di Medan dan Surabaya. Saat ini, hanya ada dua Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Tiongkok Daratan yaitu KJRI Guangzhou dan KJRI Shanghai. KJRI Hong Kong memiliki status berbeda karena wilayah kerjanya dialihkan dari Inggris dan Portugis ke RRT pada tahun 1997 dan 1999.

Sejalan dengan terus menguatnya hubungan bilateral di tataran pemerintahan, hubungan bisnis dan antar masyarakat juga semakin erat. Di awal tahun 2020 sebelum terjadinya pandemi, tercatat terdapat lebih dari 16.000 pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di RRT. Selain para pelajar, masih banyak WNI yang bekerja dan tinggal di Tiongkok bersama keluarga mereka.

Berbagai perusahaan Indonesia juga beroperasi di Tiongkok, menanamkan modal di beragam bidang usaha. Sebaliknya, semakin banyak perusahaan Tiongkok yang berbisnis dengan dan di Indonesia, menjadi Tiongkok sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia.

Sesuai dengan fokus utama diplomasi RI saat ini yaitu kerja sama ekonomi, implementasi kerja sama kesehatan dan vaksin, pemulihan Indonesia dari wabah COVID-19, penguatan sinergi *global maritime fulcrum* dan *Belt and Road Initiative* di bidang infrastruktur dan pelindungan WNI maka penambahan KJRI di wilayah RRT menjadi langkah yang tepat. Penambahan satu KJRI di RRT akan membagi beban kerja di bidang ekonomi, pemulihan pasca pandemi, dan pelindungan WNI Perwakilan RI di Tiongkok menjadi lebih merata.

Pembukaan KJRI di RRT, khususnya di Tiongkok Tengah akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara anggota ASEAN. Saat ini Indonesia termasuk negara anggota ASEAN yang memiliki paling sedikit perwakilan konsuler di RRT selain Myanmar yang memiliki tiga konsulat jenderal di Tiongkok Daratan dan Brunei Darussalam yang hanya memiliki satu konsulat jenderal di Hong Kong. Negara anggota ASEAN dengan jumlah konsulat jenderal terbanyak adalah Thailand dengan sembilan konsulat jenderal di Tiongkok Daratan dan satu di Hong Kong.

Persebaran KJRI di RRT saat ini, lebih dititikberatkan di pesisir timur RRT, yaitu di Shanghai dan Guangzhou, serta Hong Kong, sehingga penambahan KJRI di wilayah barat atau tengah RRT akan menyeimbangkan kehadiran misi Indonesia di Tiongkok dan sekaligus juga meningkatkan peluang strategis Indonesia untuk memperluas pasar dan penguatan pelindungan WNI di Tiongkok. Untuk itu, adalah tepat apabila pembukaan KJRI baru dilakukan di kota Chengdu, Provinsi Sichuan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu.

B. Dasar Hukum

Peraturan nasional dan internasional yang menjadi dasar hukum bagi pembukaan Konsulat Jenderal:

1. Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan tahun 1963 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1961) dan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan perubahannya, terakhir sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

BAB II
DASAR PERTIMBANGAN

A. Aspek Politik

Kemitraan Strategis Komprehensif antara RI dan RRT menjadi pondasi politik terkuat. Sejak dicanangkan di tahun 2013, Kemitraan Strategis Komprehensif mempererat dialog tingkat tinggi antara kedua negara. Pertemuan Presiden RI dengan Presiden, Perdana Menteri, dan Utusan Khusus dari RRT terlaksana lebih dari 10 kesempatan. Walau terhambat pandemi COVID-19, dialog ini juga masih terjaga melalui sarana telekonferensi.

Manifestasi kedekatan hubungan antara kedua negara adalah kunjungan Presiden RI ke Chengdu pada 27-28 Juli 2023 dan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada 16-18 Oktober 2023. Sementara itu PM RRT Li Qiang melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada 8 September 2023, di sela-sela KTT ASEAN ke-43 dan *East Asia Summit.* Kunjungan tersebut merupakan kunjungan luar negeri pertama yang dilakukan PM Li Qiang sejak dilantik pada bulan Maret 2023.

Pada tahun 2022, Presiden RI melakukan kunjungan ke Beijing pada 26 Juli 2022. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi kepala negara asing pertama ke RRT pasca-pandemi. Presiden RRT juga menghadiri KTT G20 di Bali, pada 15-16 November 2022, yang merupakan kunjungan pertama Presiden Xi Jinping ke luar negeri setelah terpilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok.

Dalam upaya semakin memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif, kedua negara juga telah menyepakati Rencana Aksi Penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif periode 2022-2026 untuk memperkuat dan memperdalam kerja sama di berbagai bidang.

Pembukaan KJRI Chengdu akan menjadi jawaban bagi undangan yang sudah disampaikan Pemerintah RRT pada bulan Januari 2013. Tawaran tersebut disampaikan dalam kaitan dengan pembukaan Konsulat Jenderal RRT di Bali. Terkait dengan tawaran tersebut, pada bulan Februari 2013 KBRI Beijing telah mengirimkan kajian dan usulan pembukaan KJRI Chengdu. Pemerintah Provinsi Sichuan dan Kota Chengdu hingga saat ini juga tetap mengundang Pemerintah RI untuk membuka perwakilan di wilayah tersebut.

Saat ini Pemerintah RI hanya memiliki dua konsulat jenderal di Tiongkok Daratan yaitu di Guangzhou dan Shanghai ditambah KJRI Hong Kong. KJRI Guangzhou memiliki wilayah kerja provinsi Guangdong, Guangxi, Fujian, dan Hainan. KJRI Shanghai memiliki wilayah kerja provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, dan Kota Shanghai (setingkat provinsi). KJRI Hong Kong menangani Hong Kong SAR dan Macau SAR yang memiliki kondisi otonomi dan aturan hukum yang sangat berbeda dengan Tiongkok Daratan.

Dengan proyeksi wilayah kerja KJRI Chengdu yang akan mencakup Provinsi

Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu. Pemerintah RI diharapkan dapat memperkuat kerja sama khususnya di bidang ekonomi dan sosial budaya serta meningkatkan kehadiran negara di seluruh wilayah tersebut.

Selain seluruh faktor tersebut, penambahan konsulat jenderal di Tiongkok juga menunjukkan keseriusan Pemerintah RI dalam meningkatkan hubungan dengan RRT. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki perwakilan paling sedikit di Tiongkok selain Brunei Darussalam dan Myanmar. Daftar konsulat jenderal negara-negara ASEAN adalah:

- **Thailand** (sembilan konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Kunming, Nanning, Xi'an, Chengdu, Qingdao, Xiamen, dan Hong Kong.
- **Kamboja** (sembilan konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Kunming, Nanning, Xi'an, Chongqing, Haikou, Jinan dan Hong Kong.
- **Malaysia** (enam konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Kunming, Nanning, Xi'an dan Hong Kong.
- **Filipina** (enam konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Chongqing, Xiamen, Macau, dan Hong Kong.
- **Singapura** (lima konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Xiamen, Chengdu, dan Hong Kong.
- **Laos** (enam konsulat jenderal dan satu kantor urusan konsuler): Shanghai, Kunming, Nanning, Changsha, Guangzhou dan Hong Kong ditambah satu kantor urusan konsuler di Jinghong, Provinsi Yunnan.
- **Vietnam** (lima konsulat jenderal): Guangzhou, Shanghai, Kunming, Hong Kong dan Nanning.
- **Brunei Darussalam** (satu konsulat jenderal): Hong Kong.
- **Myanmar** (empat konsulat jenderal): Nanning, Kunming, Chongqing, dan Hong Kong.

B. Aspek Ekonomi

Kerja sama bidang ekonomi, perdagangan dan investasi RI-RRT tumbuh pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tren peningkatan perdagangan semakin terlihat di tahun 2021 ketika total perdagangan RI-RRT untuk pertama kalinya melebihi USD 100 miliar dan terus berlanjut pada tahun 2022 sebesar USD 133,56 miliar dan tahun 2023 sebesar USD 127,82 miliar. Meskipun total perdagangan RI-RRT mengalami penurunan pada 2023, namun untuk pertama kalinya RI mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 2,05 miliar. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan mengingat sebelumnya RI mengalami defisit perdagangan sebesar USD 18,4 miliar pada tahun 2018.

Kondisi neraca perdagangan di antara kedua negara semakin berimbang terutama dengan penguatan ekspor non-migas Indonesia ke RRT (ekspor besi baja, industri pengolahan dan pertambangan, maupun produk pertanian Indonesia ke Tiongkok). RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik/BPS, diperkirakan sekitar 25% dari total ekspor dan impor Indonesia dilangsungkan dengan RRT.

Khusus untuk provinsi yang menjadi wilayah kerja KJRI Chengdu, berikut data perdagangan Indonesia dengan provinsi-provinsi tersebut yang dapat dihimpun dari Kementerian Perdagangan RR

Tabel 1

Wilayah	2018	2021	2022	2023
Sichuan	Total: USD 928,02 juta Ekspor: USD 123,9 juta Impor: USD 804 juta	Total: USD 1,432 miliar Ekspor: USD 800,7 juta Impor: USD 631,4 juta	Total: USD 1,834 miliar Ekspor: USD 846,212 juta Impor: USD 987,895 juta	Total: USD 2,464 miliar Ekspor: USD 1,219 miliar Impor: USD 1,245 miliar
Chongqing	Total: USD 1,18 miliar Ekspor: USD 324,17 juta Impor: USD 853,6 juta	Total: USD 2,053 miliar Ekspor: USD 787,12 juta Impor: USD 1,27 miliar	Total: USD 2,264 miliar Ekspor: USD 685,021 miliar Impor: USD 1,579 juta	Total: USD 1,563 miliar Ekspor: USD 445,449 juta Impor: USD 1,118 miliar
Gansu	Total: USD 185,125 juta Ekspor: USD 964.723 Impor: USD 184,2 juta	Total: USD 117,184 juta Ekspor: USD 73,026 juta Impor: USD 44,16 juta	Total: USD 541,400 juta Ekspor: USD 483,953 juta Impor: USD 57,447 juta	Total: USD 717,542 juta Ekspor: USD 682,727 juta Impor: USD 34,815 juta
Shaanxi	Total: USD 133,354 juta Ekspor: USD 14,947 juta Impor: USD 118,4 juta	Total: USD 914,247 juta Ekspor: USD 674,36 juta Impor: USD 239,9 juta	Total: USD 1,086 miliar Ekspor: USD 721,249 juta Impor: USD 364,889 juta	Total: USD 1,220 miliar Ekspor: USD 675,731 juta Impor: USD 545,267 juta
Yunnan	Total: USD 357,670 juta Ekspor: USD 353,2 juta Impor: USD 4,461 juta	Total: USD 790,562 juta Ekspor: USD 210,21 juta Impor: USD 580,3 juta	Total: USD 634,836 juta Ekspor: USD 89,724 juta Impor: USD 545,112 juta	Total: USD 331,273 juta Ekspor: USD 47,543 juta Impor: USD 283,730 juta

RRT turut menempati peringkat ke-2 sumber modal asing bagi RI, di mana pada tahun 2023 total investasi asing dari RRT mencapai USD 7,4 miliar dari 6.833 proyek. Nilai tersebut belum termasuk investasi dari Hong Kong yang menempati peringkat ke-3 dengan nilai sebesar USD 6,5 miliar. Selama 5 tahun berturut-turut, RRT selalu masuk dalam lima besar negara sumber modal asing bagi RI.

Sumber investasi RRT berasal dari berbagai perusahaan, baik BUMN maupun swasta murni. Khusus untuk investasi di Konawe dan Morowali yang menjadi primadona dalam beberapa tahun terakhir, modal utama berasal dari perusahaan swasta Tiongkok. RRT bagian Tengah kini juga memiliki banyak perusahaan yang beroperasi di dunia internasional dan layak menjadi sumber investasi baru Indonesia. Beberapa perusahaan asal Provinsi Sichuan juga diketahui memiliki kerja sama dengan PT Sanghyang Seri untuk pengembangan benih di Indonesia

dan perusahaan teknologi pangan Sichuan lainnya berinvestasi di bidang perkebunan di Kalimantan.

Sektor pariwisata juga selama ini mengalami pertambahan yang signifikan, kecuali di masa pandemi COVID-19. Wisatawan Tiongkok ke Indonesia melonjak dari 926.000 orang di tahun 2014 menjadi 2,14 juta orang di tahun 2018. Di tahun 2019 angka ini sedikit turun menjadi 2,07 juta pengunjung atau 12,86 persen dari seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Pandemi COVID-19 dan hambatan perjalanan internasional yang diterapkan hampir semua negara di dunia membuat aliran wisatawan Tiongkok ke Indonesia menurun drastis, terendah pada tahun 2021 sebanyak 54.713 pengunjung atau turun 97,4% dari tingkat kunjungan tahun 2019. Tingkat kunjungan wisatawan Tiongkok ke Indonesia mulai meningkat pasca pandemi COVID-19, yaitu sebanyak 787.924 kunjungan pada tahun 2023.

Secara khusus, di akhir tahun 2019 telah dibuka penerbangan langsung dari Kunming dan Chengdu ke Indonesia untuk memenuhi permintaan wisatawan asal Tiongkok bagian tengah. Penerbangan langsung ini untuk memenuhi arus wisatawan asal Provinsi Sichuan yang mencapai 47.000 orang di tahun 2019. WNI yang berkunjung ke Sichuan juga sudah mencapai angka 54.100 orang di tahun yang sama. Pasca pandemi COVID-19, warga Tiongkok kembali antusias melakukan perjalanan ke luar negeri. Kondisi ini diharapkan dapat menarik kembali minat wisatawan Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia, serta pemulihan kembali jalur penerbangan antara Indonesia dan Tiongkok. Kehadiran KJRI di Chengdu juga akan memperkuat upaya promosi pariwisata Indonesia di wilayah Tiongkok tengah.

Investasi pengusaha asal Indonesia ke RRT juga diketahui terus meningkat, walaupun tidak terdapat angka pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah modal asal Indonesia. Dari penuturan beberapa pengusaha asal Indonesia yang memiliki perusahaan di RRT, diketahui sebagian besar investasi masih terfokus ke pesisir Timur RRT. Satu kelompok pengusaha Indonesia juga diketahui ikut serta dalam proyek perluasan kota Chengdu dan mendapat wilayah konsesi seluas 16 hektar. Berdasarkan data statistik RRT, nilai investasi Indonesia di RRT pada tahun 2022 diperkirakan mencapai USD 37,5 juta.

Realisasi peningkatan perdagangan dan investasi RI-RRT selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pandemi tidak menjadi hambatan bagi kerja sama antara kedua negara. Ke depannya, kerja sama antara kedua negara akan terus berkembang di berbagai bidang. Sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya, RRT akan segera menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Daya beli masyarakat RRT juga akan terus meningkat. Menurut data Bank Dunia, GDP RRT tahun 2018 sudah mencapai USD 13,89 triliun. Angka GDP RRT di 2019 dan 2020 tidak mengalami kenaikan berarti karena pandemi COVID-19 sehingga hanya mencapai USD 14,28 triliun dan USD 14,69 triliun. Di tahun 2021 terdapat kenaikan signifikan menjadi USD 17,73 triliun. Untuk perbandingan, GDP RRT di tahun 2000 hanya USD 1,21 triliun. Kurva serupa terlihat di GDP per kapita yang melejit dari USD 1053 (2000) ke USD 9976 (2018) dan USD 12.556,3 (2021). Jalinan kerja sama ekonomi melalui berbagai jalur seperti *ASEAN-China Free Trade Area*, *Regional Comprehensive Economic Partnership*, dan juga *Belt and Road Initiative* adalah pintu gerbang bagi transfer kemakmuran

dari Tiongkok ke Indonesia.

Pembukaan KJRI Chengdu juga akan membuka peluang pasar di luar Tiongkok. Chengdu menjadi pusat logistik di wilayah Barat RRT sehingga kini terdapat puluhan perusahaan logistik asing dan domestik seperti UPS, TNT, DHL, Maersk, COSCO, CSCL, dan Sinotrans. Sejak tahun 2012, bisnis logistik di Chengdu telah menghasilkan nilai tambah lebih dari USD 7,4 miliar dengan laju pertumbuhan di atas 15 persen per tahun. Bisnis logistik Chengdu didukung dengan bandar udara terbesar keempat di RRT dan jalur kereta api ke Asia Tengah dan Eropa melalui *New Eurasian Land Bridge*. Kondisi ini membuka peluang Chengdu menjadi alternatif jalur ekspor Indonesia ke Asia Tengah dan Eropa.

C. Aspek Sosial dan Budaya

Kerja sama yang menyangkut sosial budaya dengan RRT saat ini banyak berfokus di bidang pendidikan. Jumlah pelajar Indonesia di kawasan yang akan menjadi wilayah kerja KJRI Chengdu tidak kurang dari 400 orang. Kehadiran para pelajar ini menjadi bentuk nyata hubungan antar masyarakat antara Indonesia dan Tiongkok.

Pemerintah kedua negara terus mendorong agar institusi pendidikan Indonesia dan Tiongkok makin banyak bekerja sama. Pemerintah RRT sudah mendorong dan mensponsori banyak program studi pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia sehingga sebaliknya juga perlu dilakukan Pemerintah RI. Universitas di kota-kota utama RRT seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou telah memiliki program pengajaran bahasa dan budaya Indonesia. Promosi budaya dan bahasa Indonesia masih perlu digalakkan ke universitas di kawasan Tiongkok Tengah dan Barat.

Selain dari sisi pendidikan, kerja sama sosial budaya juga melingkupi kota kembar (*sister cities*). Chengdu memiliki kerjasama kota kembar dengan Medan namun kota-kota lain Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu belum menjalin kerja sama serupa dengan kota atau provinsi di Indonesia. Melalui jalinan kota kembar dapat digali kerja sama yang bersifat pragmatis dan menyentuh langsung kebutuhan masing-masing kota.

Bentuk lain dari kinerja yang diharapkan di bidang sosial budaya adalah peningkatan citra Indonesia yang lebih baik di Tiongkok. Dengan kata lain, masih perlu usaha yang lebih luas untuk membentuk persepsi lebih baik mengenai Indonesia di masyarakat Tiongkok. Merujuk luas wilayah RRT dan banyaknya pusat bisnis serta urban maka upaya peningkatan citra harus diperluas ke seluruh wilayah, tidak bisa terfokus ke kawasan Timur dan ibukota.

Bidang sosial budaya juga mencakup promosi kesenian dan pariwisata yang tentunya terkait dengan bidang ekonomi. Dalam kaitan ini, promosi kesenian Indonesia memberi dampak ekonomi selain mendekatkan rakyat kedua negara melalui berbagai bentuk seni.

D. Aspek Pelayanan Kekonsuleran dan Pelindungan WNI

Jumlah WNI di RRT terus meningkat secara cukup signifikan sejak penetapan Kemitraan Strategis Komprehensif tahun 2013. Mengingat sebagian besar WNI di RRT adalah pelajar, munculnya berbagai tawaran beasiswa dari RRT dan makin dikenalnya universitas RRT di dunia jelas menjadi faktor penarik utama. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 15.000 WNI pelajar di RRT namun angka ini turun drastis sejak awal 2020 karena hampir semua pelajar WNI yang sedang liburan Imlek 2020 tidak dapat kembali ke RRT akibat pandemi. Di semester kedua 2022 Pemerintah RRT membuka kembali pintu bagi pelajar WNI untuk kembali ke Tiongkok dan tercatat sekitar 7000 orang pelajar mendaftar untuk kembali. Aliran kembalinya pelajar WNI ke Tiongkok berjalan bertahap mulai September 2022 dengan jumlah sekitar 300-400 orang per bulan.

WNI non-pelajar di RRT terdiri dari berbagai kategori yaitu pekerja profesional, pasangan dari WNA baik WN RRT atau WNA lainnya, anak buah kapal (ABK), hingga ke pekerja migran ilegal. RRT hingga saat ini belum membuka peluang kerja bagi pekerja migran sektor informal seperti pembantu rumah tangga namun pada kenyataannya banyak WNI yang pernah menjadi PMI di Hong Kong, Taiwan, atau tempat lain yang kini bekerja secara ilegal di RRT.

Semakin banyaknya jumlah WNI juga membuat jumlah kasus yang melibatkan WNI juga bertambah. Dalam tiga tahun terakhir, kasus pengantin pesanan dan penyelundupan manusia melalui perbatasan selatan RRT di Yunnan, Sichuan, dan Guangxi terus meningkat. Praktik pengantin pesanan pada dasarnya tidak selalu menjadi hal negatif namun sering ditemui juga mereka yang karena keterbatasan pengetahuan atau hal lainnya menjadi tersangka pelanggaran keimigrasian. Penyelundupan manusia dengan tujuan menjadi pekerja migran ilegal adalah masalah yang lebih berat dan mendapat perhatian lebih serius dari Pemerintah RRT.

Faktor lain dalam pelindungan WNI di kawasan Tengah dan Barat RRT adalah bencana alam yang cukup sering terjadi akibat kondisi geografis kawasan ini. Gempa besar di Sichuan tahun 2008 mengakibatkan korban jiwa lebih dari 69.000 orang, korban cedera 374.176 orang, dan lebih dari 18.000 orang hilang. Gempa ini juga mengakibatkan lebih dari 200.000 lokasi tanah longsor. 4,8 juta orang kehilangan tempat tinggal dan 15 juta orang terdampak langsung.

Belajar dari pengalaman evakuasi WNI di Wuhan saat dimulainya pandemi COVID-19 pada awal 2020, jauhnya jarak KBRI Beijing ke lokasi bencana menjadi kendala besar. Koordinasi dengan pemerintah lokal, para WNI di lokasi, dan juga penyedia jasa sangat sulit dilakukan. Hal serupa juga dengan upaya pengiriman bantuan ke pemerintah setempat yang membutuhkan koordinasi langsung di lapangan.

Berkaitan dengan jarak ke KBRI Beijing, hal ini juga membuat layanan kekonsuleran dan legalisasi menjadi mahal dan memakan waktu panjang. Proses legalisasi dokumen yang seharusnya hanya perlu tiga hari kerja di perwakilan RI menjadi lebih dari satu minggu karena waktu perjalanan ke Beijing. Pada akhirnya

ini menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan atau WN RRT yang memerlukan layanan tersebut.

Hal serupa juga dialami oleh para WNI yang memerlukan layanan konsuler dan dokumen dari perwakilan RI. Dokumen-dokumen catatan sipil dan keimigrasian seperti surat keterangan pernikahan, kelahiran, dan kematian serta paspor dan afidavit hanya dapat diterbitkan di perwakilan RI dan KBRI Beijing berjarak 2.000 - 4.000 km dari wilayah kerja KJRI Chengdu. Akibatnya, para WNI yang tinggal di daerah tersebut juga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengurusan dokumen catatan sipil dan keimigrasian.

Jarak yang jauh juga menyulitkan pembinaan WNI, terutama pelajar di provinsi- provinsi tersebut. KBRI Beijing memiliki keterbatasan sumber daya dan dana untuk memberikan perhatian yang cukup, termasuk bantuan dan pelindungan bagi yang membutuhkan.

E. Urgensi

Merujuk seluruh pertimbangan tersebut di atas, urgensi pembukaan KJRI Chengdu dengan wilayah kerja mencakup Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu adalah:

1. **Realisasi lebih lanjut dari kedekatan hubungan bilateral kedua negara** (jumlah saling kunjung dan kehadiran pada KTT). Dialog intensif antara pemimpin dan pejabat tinggi negara perlu diterjemahkan dalam berbagai tindakan nyata. Kesempatan undangan Pemerintah RRT untuk membuka konsulat jenderal ketiga di Tiongkok kiranya dapat ditanggapi secara positif, sebagai bagian untuk merealisasikan kedekatan hubungan bilateral antara kedua negara.

2. Angka-angka nilai perdagangan mengindikasikan bahwa **potensi ekspor Indonesia** ke kawasan yang akan menjadi wilayah kerja KJRI Chengdu masih sangat besar. Terlebih lagi dengan memperhatikan minat pasar RRT terhadap produk Indonesia yang cukup besar. Potensi perdagangan juga tidak hanya terbatas dengan bagian Tengah dan Barat RRT namun juga membuka peluang jalur ekspor ke Asia Tengah. Potensi serupa juga tercermin di sektor investasi, di mana peluang investasi *inbound* maupun *outbound* antara kedua negara masih sangat terbuka untuk dijajaki.

3. **Jumlah WNI** secara umum di RRT, terutama di kawasan yang akan menjadi wilayah kerja KJRI Chengdu **terus meningkat**. Pelajar, pekerja profesional, dan WNI lainnya semakin banyak yang memilih tinggal di RRT bagian Tengah dan Barat. Jarak yang jauh dari KBRI Beijing atau perwakilan RI lainnya membuat pelayanan dan pelindungan WNI sulit dilakukan dengan baik, terutama dalam kondisi bencana. Jarak juga menyulitkan layanan kekonsuleran yang krusial bagi transaksi bisnis dan dokumen sipil para WNI serta keluarga.

4. Faktor lain yang menjadi urgensi adalah **tingkat kehadiran Indonesia di RRT**

***vis-a-vis* negara-negara anggota ASEAN lainnya**. Saat ini Indonesia dan Myanmar adalah negara anggota ASEAN yang memiliki perwakilan paling sedikit di RRT. Kehadiran KJRI Chengdu akan menyeimbangkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di wilayah tengah dan barat RRT dan akan membantu daya saing promosi produk Indonesia di kawasan tersebut.

5. Pemerintah RRT nampak cenderung mendukung pembukaan KJRI di Chengdu. Pendekatan Indonesia untuk pembentukan Kantor Penghubung di Chengdu tidak disetujui oleh pemerintah RRT dan pemerintah Indonesia disarankan untuk membuka kantor Konsulat Jenderal.

F. Manfaat

Pembukaan KJRI Chengdu akan memberikan manfaat bagi Indonesia berupa:

1. **Penguatan kehadiran Indonesia di Tiongkok, khususnya di kawasan Tengah dan Barat**. Saat ini, Indonesia telah memiliki KBRI di Beijing serta KJRI di Shanghai dan Guangzhou yang semuanya terletak di kawasan Timur. Indonesia belum memiliki perwakilan RI di kawasan Tiongkok Tengah dan Barat.

2. **Membagi beban kerja KBRI Beijing guna meningkatkan layanan** kekonsuleran, pelindungan WNI, serta promosi ekonomi di kawasan Tiongkok Tengah dan Barat.

3. **Meningkatkan intensitas pendekatan** ke pemerintah daerah dan nasional dalam meraih dukungan bagi kerja sama ekonomi, penyelesaian kasus konsuler, pembinaan WNI dan pelajar, dan promosi kebudayaan.

4. **Meningkatkan** penetrasi pasar di Tiongkok bagian Tengah dan Barat serta membuka pintu ke Asia Tengah sebagai salah satu pasar non tradisional.

5. **Meningkatkan akses kekonsuleran bagi WNI** dalam rangka memberikan pelindungan secara cepat dan pembinaan bagi WNI di Tiongkok bagian Tengah dan Barat.

G. Analisa *Cost and Benefit*

OPSI I WILAYAH TENGAH DAN BARAT RRT MASIH DITANGANI OLEH KBRI BEIJING	OPSI II WILAYAH TENGAH DAN BARAT RRT DITANGANI OLEH KJRI CHENGDU
Pelaksanaan tugas kurang maksimal, terutama untuk fokus pada bidang ekonomi dan pelayanan konsuler/pelindungan WNI.	Pelaksanaan tugas dapat lebih merata terlebih keberadaan KJRI Chengdu cukup strategis di kawasan Tiongkok Tengah dan Barat menjadi hub ekonomi dan transportasi/logistik hingga ke Asia Tengah bahkan Eropa. Terdapat peluang yang cukup besar dalam memasarkan produk Indonesia sekaligus menarik investasi masuk ke Indonesia.
Pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI kurang maksimal dan memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya lebih mahal bagi pengguna jasa.	Pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI dapat lebih cepat dan intens.
Pelaksanaan promosi dan kerja sama sosial budaya kurang maksimal. Intensitas interaksi dengan pejabat/pengusaha/tokoh masyarakat setempat masih kurang, begitu juga dengan peningkatan citra Indonesia.	Pelaksanaan promosi dan kerja sama sosial budaya dapat lebih maksimal dengan tingkat intensitas yang tinggi, pendekatan ke media lokal yang lebih baik, dan kerja sama lain di bidang pendidikan juga lebih mudah dilakukan.

BAB III
MISI DAN STRUKTUR PERWAKILAN

A. Bobot Misi Perwakilan

Indeks KJRI Chengdu yang diusulkan adalah 2,63 dengan indeks tertinggi pada fungsi Ekonomi sebesar 2,91 diikuti dengan fungsi Protokol dan Konsuler sebesar 2,54 dan fungsi Penerangan dan Sosial Budaya sebesar 2,44.

1. Fungsi Ekonomi

Bermodalkan ACFTA dan RCEP serta dukungan politik melalui kerangka Kemitraan Strategis Komprehensif, hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok terus beranjak maju. Investasi dari RRT juga mengalir ke Indonesia di berbagai sektor ekonomi. Walau investasi Indonesia ke Tiongkok belum pernah diukur dengan tepat namun diketahui beberapa pengusaha besar Indonesia juga sudah lama menanamkan modal mereka.

Keberadaan KJRI di Chengdu akan mendorong peningkatan hubungan ekonomi terutama perdagangan dan investasi untuk kawasan Tiongkok bagian Tengah dan Barat. KJRI Chengdu juga akan membuka peluang lebih besar bagi ekspor Indonesia ke Asia Tengah sekaligus jalur alternatif ekspor ke Eropa.

Walau catatan nilai perdagangan dan investasi menunjukkan pertumbuhan yang baik, namun demikian negara-negara anggota ASEAN lainnya juga menjadi pesaing kuat. KJRI Chengdu akan menjadi kunci bagi peningkatan hubungan ekonomi dan realisasi kualitas hubungan politik kedua negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indeks fungsi ekonomi KJRI Chengdu diusulkan sebesar 2,91

2. Fungsi Protokol dan Konsuler

KJRI Chengdu dengan wilayah kerja Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu akan bertanggung jawab atas keberadaan 600 - 1500 orang WNI dengan berbagai status. Sebagian besar WNI berada di kota-kota besar seperti Chengdu, Chongqing, Kunming, dan Taiyuan. Diketahui juga para WNI yang menikah dengan WN RRT banyak bertempat tinggal di kawasan pedesaan dan cukup jauh dari kota.

Peran KJRI Chengdu akan sangat penting dalam memberikan pelayanan kekonsuleran, pelindungan WNI, dan bantuan lainnya. Akses yang baik dari Chengdu ke daerah sekitar memudahkan jangkauan layanan tersebut, mengingat sebelumnya layanan konsuler dan pelindungan WNI hanya diberikan dari KBRI Beijing. Perlu diingat juga bahwa kawasan Tiongkok Tengah dan Barat cukup rentan dari bencana alam seperti gempa dan tanah longsor. Bercermin dari gempa Sichuan 2008 dan evakuasi akibat wabah COVID-19 di Wuhan, Februari 2020 maka kecepatan respon menjadi kunci utama.

Kunjungan bilateral utamanya di wilayah kerja KJRI Chengdu dibutuhkan pelayanan keprotokolan tersendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indeks fungsi protokol dan konsuler KJRI Chengdu diusulkan sebesar 2,54

3. Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya

KJRI Chengdu akan memberikan dukungan lebih besar bagi peningkatan hubungan antar masyarakat (*people to people contact*), promosi kebudayaan dan kesenian, kerja sama pendidikan, dan peningkatan citra Indonesia secara keseluruhan. Luas wilayah kerja KJRI Chengdu akan menjadi tantangan tersendiri namun melihat kesuksesan di KBRI Beijing, KJRI Guangzhou, dan KJRI Shanghai selama ini maka tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara khusus, kinerja di bidang sosial-budaya akan mendukung upaya peningkatan kunjungan wisatawan asal RRT ke Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan asal RRT tercatat mencapai lebih dari 2 juta orang. Penerbangan langsung dari Chengdu dan Kunming ke Indonesia juga sudah pernah terlaksana. Tantangan jangka pendek adalah memulihkan jumlah wisatawan di era pasca COVID-19 dan untuk jangka panjang adalah membentuk pasokan wisatawan yang stabil dari kawasan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, indeks fungsi penerangan dan sosial budaya pada KJRI Chengdu diusulkan sebesar 2,44

Berdasarkan usulan besaran indeks KJRI Chengdu sebagaimana disebutkan sebelumnya, susunan organisasi KJRI Chengdu diusulkan sebagai berikut:

A. Unsur Pimpinan
    1. Konsul Jenderal.
B. Unsur Pelaksana
    1. *Counsellor* fungsi Ekonomi*;*
    2. *Counsellor* fungsi Protokol dan Konsuler;
    3. Sekretaris II fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya;
    4. Sekretaris III fungsi Ekonomi.
C. Unsur Penunjang
    1. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan;
    2. Petugas Komunikasi.

B. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KJRI Chengdu akan mencakup Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu. Rincian profil masing-masing provinsi dan Kota Chengdu terlampir.

LAMPIRAN

Profil Wilayah Kerja KJRI Chengdu

Provinsi Sichuan

14 negara saat ini memiliki perwakilan di ibukota provinsi Sichuan, yakni Chengdu, yaitu Australia, Austria, Turki, Israel, Jerman, Korea Selatan, Pakistan, Polandia, Prancis, Singapura, Nepal, Chile, Spanyol, dan Thailand. AS menjadi negara pertama yang membuka konsulat jenderal di Chengdu pada 16 Oktober 1985 namun ditutup setidaknya untuk sementara pada 27 Juli 2020. Selain 14 konsulat jenderal tersebut, masih terdapat dua pusat proses visa milik Kanada dan Inggris. Chengdu memiliki kerjasama kota kembar dengan Medan, Sumatera Utara.

Chengdu adalah salah satu kota utama dan tertua di RRT dan ditetapkan sebagai pusat logistik, perdagangan, keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah barat RRT. Di samping itu, Chengdu juga menjadi basis industri manufaktur dan pertanian. Saat ini Chengdu memiliki tiga pusat ekonomi dan perdagangan yaitu *Chengdu Economic & Technological Development Zone*, *Chengdu Export Processing Zone* dan *Chengdu Hi-Tech Industrial Development Zone*.

Secara khusus, Chengdu menjadi pusat logistik di wilayah Barat RRT sehingga kini terdapat puluhan perusahaan logistik asing dan domestik seperti UPS, TNT, DHL, Maersk, COSCO, CSCL, dan Sinotrans. Sejak tahun 2012, bisnis logistik di Chengdu telah menghasilkan nilai tambah lebih dari RMB 50 miliar (USD 7,4 miliar) dengan laju pertumbuhan di atas 15 persen per tahun. Bisnis logistik Chengdu didukung dengan jalur kereta api barang langsung ke Eropa dan bandar udara terbesar keempat di RRT. Kondisi ini membuka peluang Chengdu menjadi alternatif jalur ekspor Indonesia ke Eropa dan Asia Tengah.

Provinsi Sichuan dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di RRT. Sichuan menghasilkan padi, gandum, jeruk, gula tebu, kentang dan umbi-umbian, serta buah-buahan lain. Sichuan adalah penyuplai daging babi terbesar dan penghasil kepompong ulat sutra terbesar kedua di RRT. Di sektor mineral dan pertambangan, Sichuan memiliki cadangan sumber daya mineral yang kaya termasuk vanadium, titanium dan lithium terbesar di RRT. Sichuan juga memiliki cadangan gas alam terbesar di RRT dan menyuplai banyak provinsi lain.

Sichuan adalah salah satu pusat industri utama RRT dengan produk beragam dari industri berat seperti besi dan baja serta industri ringan seperti bahan bangunan dan makanan. Daerah Chengdu dan Mianyang menjadi pusat produksi tekstil dan produk elektronik. Deyang, Panzhihua, dan Yibin menjadi pusat produksi mesin dan industri metalurgi. Pemerintah pusat dan daerah juga mendorong pengembangan industri berteknologi tinggi seperti teknologi informasi, farmasi, makanan, elektronika, dan otomotif. Khusus untuk otomotif, produsen dunia seperti Volvo, Volkswagen dan Toyota telah membuka pabrik perakitan mobil sehingga di tahun

2020 saja Chengdu telah memiliki kapasitas produksi 1,25 juta unit kendaraan.

Secara khusus Sichuan memiliki kelebihan di industri penerbangan dan pertahanan. Di ibukota provinsi terdapat Chengdu Aircraft Company—salah satu dari perusahaan utama teknologi aviasi militer RRT—yang memproduksi pesawat tempur J-10 dan JF-17. Sichuan juga memiliki Xichang Satellite Launch Center yang menjadi lokasi peluncuran roket ruang angkasa Long March.

Data nilai total perdagangan luar negeri Sichuan mencapai USD 89,921 miliar di tahun 2018 dan lima mitra dagang terbesar adalah AS (USD 22,7 miliar), Vietnam (USD 7,3 miliar), Jepang (USD 6,59 miliar), Korea Selatan (USD 5,61 miliar), dan Malaysia (USD 5,18 miliar). Di tahun 2022 nilai perdagangan luar negeri Sichuan meningkat ke USD 151,171 miliar dengan mitra dagang utama masih AS (USD 29,26 miliar) dan Vietnam (USD 10.4 miliar) disusul oleh Korsel (USD 9,79 miliar), Malaysia (USD 8,93 miliar), Taiwan (USD 7,75 miliar), Jepang (USD 7,14 miliar), Irlandia (USD 7,1 miliar), Belanda (USD 6,3 miliar), Hong Kong (USD 5,95 miliar), dan Australia (USD 5,36 miliar).

Pada Tahun 2023 total angka perdagangan luar negeri Sichuan sebesar USD 135,984 miliar dengan mitra dagang utama AS (USD 21,33 miliar), Vietnam (USD 11,05 miliar), Korea Selatan (USD 8,12 miliar), Australia (USD6,86 miliar), Taiwan (USD 6,78 miliar), Jepang (USD 5,67 miliar), dan Malaysia (USD 5,62 miliar).Mitra dagang luar negeri dengan nilai ekspor-impor lebih dari USD 1 miliar berjumlah 16 mitra di tahun 2018, meningkat menjadi 24 mitra di 2021,27 mitra di 2022, dan 26 mitra di 2023. Ekspor terbesar Sichuan masih didominasi produk mesin dan elektronik sebesar lebih dari 80 persen dari tahun 2018 hingga 2022.
GDP tahun 2022 mencapai RMB 5,6 triliun (USD 843,725 miliar) atau peringkat enam dari seluruh daerah setingkat provinsi di RRT. Namun karena tingginya jumlah penduduk yang lebih dari 83,6 juta jiwa – keempat terbesar di RRT – maka angka GDP per kapita di Sichuan hanya berkisar pada RMB65.000 (USD9.700), peringkat ke-18 dari 31 daerah setingkat provinsi.

Provinsi Sichuan juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan konservasi alam karena lokasi geografisnya. Secara khusus, Sichuan adalah wilayah endemik panda yang menjadi hewan nasional RRT.

Pada bulan Desember 2019, KBRI Beijing mencatat setidaknya 134 orang WNI tinggal di Provinsi Sichuan dan sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa. Diperkirakan masih ada WNI lain yang bekerja dan tinggal di Sichuan namun tidak mendaftarkan diri ke KBRI Beijing. Jarak antara Provinsi Sichuan ke Beijing yang tidak kurang dari 1800 km harus ditempuh selama 3 jam dengan penerbangan. Hal ini yang menyebabkan kurangnya keterikatan antara WNI di Sichuan dengan KBRI Beijing, selain mempersulit pelayanan dan pengawasan.

Kota Chongqing

Kota Chongqing dinyatakan berdiri sendiri sejak tahun 1997 dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah barat RRT. Chongqing berkembang amat pesat, pada tahun 2006 pernah tercatat peningkatan

jumlah penduduk mencapai 1.300 orang per hari. Luas area kota Chongqing kini mencapai 82.400km^2 dengan populasi 32,13 juta orang.

Chongqing adalah pusat produksi kendaraan bermotor terbesar ketiga di RRT dengan kapasitas 1 juta mobil dan 8,6 juta sepeda motor. Perusahaan otomotif utama RRT termasuk Changan Automotive Corp, Lifan Hongda Enterprise, dan Ford Motor Co. memiliki pabrik di Chongqing. Untuk mendukung ini, di Chongqing terdapat pabrik aluminium terbesar di Asia milik South West Aluminium dan pabrik baja Chongqing Iron and Steel Company.

Chongqing juga direncanakan akan menjadi lokasi kilang penyulingan minyak dengan kapasitas 10 juta ton yang memproses minyak mentah dari jalur pipa minyak RRT-Myanmar. Pipa minyak ini akan dibangun dari pelabuhan di Sittwe (Myanmar) melalui Kunming ke Chongqing.

Data nilai total perdagangan luar negeri Chongqing mencapai USD 79,017 miliar di tahun 2018 dan lima mitra dagang terbesar adalah AS (USD 16,1 miliar), Korea Selatan (USD 7,38 miliar), Jerman (USD 6,8 miliar), Taiwan (USD 4 miliar), dan Jepang (USD 3,39 miliar). Di tahun 2022 nilai perdagangan luar negeri Chongqing meningkat ke USD 122,83 miliar dengan mitra dagang utama AS (USD 17 miliar) dan disusul oleh Korea Selatan (USD 11,78 miliar), Taiwan (USD 9,44 miliar), Hong Kong (USD 8,46 miliar), Jerman (USD 7,72 miliar), Vietnam (USD 7,31 miliar), Jepang (USD 4,5 miliar), dan selanjutnya Malaysia, India, dan Thailand dengan nilai sekitar USD 2,7 - 3,5 miliar.

Pada Tahun 2023 total angka perdagangan luar negeri Chongqing mencapai USD101,56 miliar dengan mitra dagang utama AS (USD12,19 miliar), Korea Selatan (USD9,74 miliar), Taiwan (USD6,78 miliar), Jerman (USD6,27 miliar), dan Vietnam (USD5,67 miliar). Seperti Sichuan, produk ekspor asli Chongqing didominasi produk industri terutama kendaraan bermotor dan elektronik. Posisi Chongqing sebagai pusat logistik dan jalur ekspor melalui KA ke Eropa, terutama Jerman menjadi keunggulan tersendiri kota metropolitan ini.

GDP Chongqing pada tahun 2022 mencapai RMB 2,912 triliun (USD 433,075 miliar) yang dibagi dengan sekitar 32 juta penduduk menjadikan GDP per kapita pada RMB 86.879 (USD 13.466). Angka ini mendorong Chongqing ke peringkat delapan wilayah dengan tingkat kemakmuran tertinggi di RRT. Sesuai program pembangunan wilayah barat, Pemerintah RRT memberi dukungan amat kuat bagi pembangunan Chongqing guna menjadi salah satu pusat ekonomi.

Jumlah WNI per Desember 2019 di Chongqing tercatat hanya sekitar 300 orang dan sebagian besar adalah mahasiswa dan pelajar. Jarak yang jauh dari Beijing menyulitkan pelayanan WNI yang optimal. Chongqing berjarak 1800 km lebih dari Beijing dan harus ditempuh dengan kereta api dalam waktu 26 jam atau penerbangan 3 jam.

Provinsi Gansu

Gansu adalah wilayah tingkat provinsi terbesar ketujuh di RRT dengan luas sekitar

425.900km^2. Gansu terletak di antara Dataran Tinggi Tibet dan Dataran Tinggi Loess sekaligus berbatasan dengan Provinsi Gobi-Altai, Mongolia. Sungai Kuning mengalir melalui Gansu, sebagian Gurun Gobi terletak di timur, dan pegunungan Qilian berada di selatan.

Gansu memiliki penduduk sekitar 24,9 juta jiwa dengan densitas hanya 55 jiwa per kilometer persegi. 73 persen penduduk tinggal di pedesaan dan mayoritas terdiri dari etnis Han. Etnis Hui, Tibet, Dongxiang, Tu, Yugur, Mongol, Bonan, Salar, dan Kazakh juga hidup di sebagian wilayah Gansu. Ragam budaya dan kepercayaan menjadi bukti keberadaan Gansu sebagai titik penting di era Jalur Sutra.

Namun demikian, dengan sumber daya alam yang terbatas maka Gansu kini menjadi salah satu provinsi termiskin di Tiongkok. Pada Tahun 2023 total angka perdagangan luar negeri Gansu sebesar USD 7 miliar dengan mitra dagang utama Kazakhstan (USD1,775 miliar), Indonesia (USD 714,99 juta), Rusia (USD 434,95 juta), Australia (USD 318,06 juta), Mongolia (USD 309,01 juta), Malaysia (USD 279,34 juta), dan Republik Demokratik Kongo (USD 267 juta). GDP Gansu pada tahun 2022 hanya RMB 1,11 triliun (USD 166,54 miliar) dan GDP per kapita masih hanya RMB 41 ribu (USD 6.300) sehingga Gansu menempati ranking terendah dari 31 wilayah setingkat provinsi di RRT. Letak geografis Gansu juga membuat provinsi ini rawan gempa dan kekeringan, sehingga peningkatan kemakmuran juga berjalan perlahan.

Ekonomi Gansu masih berpusat di industri pertambangan, petrokimia, dan ekstraksi mineral, terutama *rare earth*. Gansu memiliki cadangan antimoni, krom, batubara, cobalt, tembaga, fluorite, gipsum, iridium, besi, timbel (timah hitam), kapur, raksa, mirabilite, nikel, platina, troilite, tungsten, and seng. Gansu juga memiliki ladang minyak di Yumen dan Changqing. Khusus nikel, cadangan nikel di Gansu mencakup 90 persen cadangan nikel Tiongkok. Kontribusi sektor pariwisata mulai meningkat bermodalkan bentang alam dan peninggalan sejarah, selain sejalan juga dengan semakin makmurnya rakyat Tiongkok.

Saat ini diketahui setidaknya sembilan orang WNI tinggal di Gansu, hampir semuanya wanita yang menikah dengan WN RRT.

<u>Provinsi Shaanxi</u>

Provinsi Shaanxi memiliki luas lebih dari 205.600km^2 dengan populasi 39,54 juta jiwa. Daerah ini menjadi pusat kemunculan peradaban Tiongkok sejak masa Dinasti Zhou sekitar tahun 1100 SM. Kota Xi'an dibangun dari dua bekas ibukota kekaisaran yaitu Chang'an dan Fenghao sehingga telah berumur lebih dari tiga ribu tahun.

Bentang alam Shaanxi bervariasi dari pegunungan di selatan, lembah dan basin di tengah, dan tepi gurun serta padang rumput di utara. Beberapa sungai mengalir di Shaanxi memberi lahan yang subur untuk pertanian dan kemampuan menunjang populasi sejak tiga milenia lalu.

Ekonomi Shaanxi saat ini menempati peringkat ke-15 dari seluruh provinsi di RRT. Shaanxi adalah penyedia batubara terbesar ketiga di RRT dengan pangsa pasar 17-20 persen di tahun 2019-2022. Jumlah tambang batubara di Shaanxi tidak

kurang dari 640 titik dan menghasilkan lebih dari 600 juta ton per tahun sejak 2018. Shaanxi juga menjadi penyuplai minyak bumi dari ladang minyak Yanchang yang juga sumur minyak pertama di Tiongkok dan berproduksi sejak 1907.

Selain bahan bakar fosil, industri besar di Shaanxi adalah pesawat terbang dan peralatan terkait penerbangan. Hal ini juga sesuai dengan doktrin pertahanan RRT mengenai *strategic depth* dan upaya modernisasi peralatan militer, industri teknologi tinggi terutama pesawat terbang dan ruang angkasa berkembang pesat di Shaanxi. Pada tahun 2007 Pemerintah RRT membangun Xi'an National Civil Aerospace Industrial Base di Xi'an, ibukota Shaanxi.

Salah satu BUMN industri penerbangan terbesar RRT, Aviation Industry Corporation of China (AVIC) memiliki dua anak perusahaan di Shaanxi yaitu Xi'an Aircraft Industrial Corporation dan Shaanxi Aircraft Corporation yang memproduksi beragam jenis pesawat terbang sipil dan militer. Di Xi'an juga terdapat Xi'an Aero-Engine Corporation yang merancang dan memproduksi mesin jet untuk keperluan sipil dan militer RRT. Data terakhir menyebutkan sekitar 50 persen riset dan pengembangan teknologi serta produksi industri penerbangan sipil RRT berada di Shaanxi.

Data nilai total perdagangan luar negeri Shaanxi baru mencapai USD 53,3 miliar di tahun 2018 dan tiga mitra dagang yang jauh melebihi mitra lain adalah Korea Selatan (USD 10,2 miliar), Taiwan (USD 10,18 miliar), dan Hong Kong (USD 9,38 miliar) kemudian baru AS (USD 6,39 miliar) dan Jepang (USD 2,36 miliar). Di tahun 2022 nilai perdagangan luar negeri Shaanxi meningkat ke USD 72,641 miliar dengan mitra dagang utama Korea Selatan (USD 13,78 miliar) dan Taiwan (USD 10,99 miliar) disusul oleh AS (USD 5,61 miliar), Hong Kong (USD 5,16 miliar), Malaysia (USD 4,58 miliar), Jepang (USD 3,58 miliar). Indonesia berada di peringkat ke-12 dengan nilai perdagangan USD 1,086 miliar.

Pada tahun 2023, nilai total perdagangan luar negeri Shaanxi mencapai USD 57,52 miliar dengan mitra dagang utama masih Korea Selatan (USD 9,69 miliar), Taiwan (USD5,71 miliar), Malaysia (USD 4,06 miliar), dan Rusia (USD 4 miliar). Nilai perdagangan dengan Indonesia meningkat menjadi USD 1,22 miliar.

GDP tahun 2022 Shaanxi mencapai RMB 3,27 triliun (USD 487,246 miliar) dan menempati posisi menengah, peringkat ke-14 dari 31 daerah setingkat provinsi di RRT. Dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta jiwa, angka GDP per kapita di Shaanxi berada di RMB 75.000 (USD 11.700), peringkat ke-12 di RRT.

Provinsi Yunnan

Provinsi Yunnan merupakan gerbang akses RRT ke negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Secara geografis, Yunnan berbatasan dengan Myanmar, Vietnam, dan Laos serta berdekatan dengan Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, India, serta Bangladesh. Lokasi geografis Provinsi Yunnan yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN memberi keuntungan bagi Yunnan dalam perdagangan lintas batas, terutama melalui Sungai Mekong. Sungai Mekong dan Yangtze juga memberi modal utama pembangunan melalui proyek pembangkit listrik tenaga air, pertanian, perkebunan tembakau dan pertambangan. Pertanian dan produk pangan menjadi tulang punggung ekonomi Yunnan dan sangat didukung oleh kondisi bentang alam

provinsi ini. Letak Yunnan yang berdekatan dengan Pegunungan Himalaya juga memberikan berkah tambang dan mineral.

Industri manufaktur utama Yunnan adalah besi dan baja, peleburan tembaga, kendaraan niaga, kimia, pupuk, tekstil dan alat-alat optik. Yunnan adalah salah satu produsen utama produk tembaga, timah hitam, seng, timah dan aluminium di RRT. Selain mineral logam tersebut, masih terdapat cadangan germanium, iridium, zirconium, platinum, garam, sylvite, nike, fosfat, mirabilite, arsenik, dan asbestos dalam jumlah banyak di Yunnan. Cadangan tembaga dalam jumlah besar terdapat di Dongchuan, bijih besi di Wuding, batubara di Xuanwei dan Kaiyuan.

Data nilai total perdagangan luar negeri Yunnan di tahun 2018 telah mencapai USD 197 miliar. Seperempat dari perdagangan luar negeri dilakukan dengan Myanmar (USD 43,3 miliar) yang disusul oleh Vietnam (USD 27,39 miliar), Saudi Arabia (USD 21,2 miliar), Hong Kong (USD 11,67 miliar), dan Laos (USD 7 miliar). Nilai perdagangan luar negeri Yunnan menurun drastis saat pandemi COVID-19, dan pada tahun 2022 angka perdagangan luar negeri Yunnan baru mencapai USD 50,041 miliar dengan mitra dagang terbesar Myanmar (USD 7,36 miliar) dan kemudian Saudi Arabia (USD4,3 miliar), Vietnam (USD 3,25 miliar), AS (USD 3 miliar), dan Thailand (USD2.35 miliar).

Pada tahun 2023, total nilai perdagangan luar negeri Yunnan mengalami penurunan menjadi USD36,773 miliar dengan mitra dagang terbesar tetap Myanmar (USD 8,44 miliar), Saudi Arabia (USD 3,48 miliar), Vietnam (USD 2,64 miliar), Laos (USD 1,95 miliar), Thailand (USD 1,92 miliar), Kuwait (USD 1,54 miliar), dan Brazil (USD 1,51 miliar). Dari data tersebut terlihat negara-negara ASEAN menjadi mitra utama perdagangan luar negeri Yunnan dengan berbagai komoditi. Selain itu, Yunnan juga menjadi salah satu pintu impor minyak dan gas RRT dengan produsen di Timur Tengah.

GDP tahun 2022 Yunnan mencapai RMB 2,895 triliun (USD 430,475 miliar) dan menempati peringkat ke-18 dari 31 daerah setingkat provinsi di RRT. Dibagi penduduk sekitar 47 juta jiwa, angka GDP per kapita di Yunnan berada di sekitar RMB 58000 (USD 9000), peringkat ke-23 di RRT.

Pariwisata adalah salah satu andalan Yunnan dan pemasukan dari sektor pariwisata mencapai 12,6 persen dari GDP Yunnan. Sektor pariwisata ini juga yang menarik tenaga profesional dari Indonesia untuk bekerja di beberapa daerah tujuan utama Yunnan. Saat ini cukup banyak WNI tenaga profesional sektor pariwisata yang bekerja di Yunnan dan juga pelajar terutama yang mendapat beasiswa dari Pemerintah RRT.

Jarak Yunnan ke Beijing yang tidak kurang dari 2500 menjadi faktor utama kurang optimalnya hubungan dan pelayanan WNI. Masalah konsuler dan imigrasi terkait WNI yang tercatat beberapa kali muncul di Yunnan adalah indikasi penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Modus operandi yang tercatat adalah memasuki wilayah RRT melalui batas darat dan sungai dengan Vietnam. Para WNI tersebut kemudian bekerja secara ilegal di banyak kota di RRT.